

**PENGARUH E-GOVERNMENT TERHADAP KEMAMPUAN KNOWLEDGE SHARING
PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA)**

Asep Fajar Firmansyah Iwa Airlangga¹, Dana Indra Sensuse²

¹Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains & Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Program Studi Magister Teknologi Informasi
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

ABSTRACT

Pemerintah daerah (PemDa) DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan e-Government. Salah satu manfaat penerapan e-Government tersebut adalah pemerintah dapat memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan menciptakan, mengintegrasikan, menukar (sharing), serta mengirimkan (transfer) informasi di dalam instansi pemerintah itu sendiri, kepada publik dan ke instansi pemerintah lainnya. Keberadaan PemDa DKI Jakarta sebagai salah satu instansi pemerintah di ibukota negara Indonesia yang menerapkan e-Government, melatarbelakangi penelitian tentang sejauhmana pengaruh e-Government terhadap kemampuan pemerintah dalam melakukan knowledge sharing. Pengukuran tingkat kemampuan pemerintah dalam melakukan knowledge sharing dilakukan dengan menggunakan model analisa Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi kontradiktif, di mana kedewasaan pengembangan e-Government belum mempengaruhi kemampuan knowledge sharing pemerintah secara signifikan.

Keyword : Knowledge Sharing Capability, e-Government, e-Government Maturity Model, Structural Equation Model (SEM).

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

e-Government merupakan sebuah fenomena di dunia saat ini untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat dan efisiensi internal dari organisasi pemerintahan. Saat ini banyak pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif dalam mengembangkan pelayanan publik dalam bentuk *web*. Menurut Direktur *e-Government* Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi (APTEL DEPKOMINFO), Bapak Djoko Agung, sudah ada 423 PemDa yang memiliki situs *e-Government* dari total 491 PemDa (89%) (<http://mastel.wordpress.com/category/e-gov/>) pada tahun 2008 ini. Bila merujuk pada data tahun 2006, PemDa yang memiliki situs *e-Government* hanya 48% dari 471 PemDa, hal tersebut menunjukkan animo PemDa-PemDa di Indonesia cukup antusias dalam menerapkan *e-Government*. Dengan adanya *e-Government* diharapkan pemerintah dapat menyediakan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden

nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*.

PemDa DKI Jakarta adalah salah satu dari sekian banyak PemDa yang menerapkan *e-Government*. Pada tahun 1977 PemDa DKI Jakarta sudah mulai membuat sistem yakni Information System Planning (ISP) yang mencakup layanan sistem informasi untuk pertanahan, kependudukan dan sistem informasi fisik prasaran dan jaringan. Tahun 1991, PemDa DKI mengembangkan sistem yang sebelumnya menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), pengembangan sistem tersebut mencakup Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelaksanaan Tugas Pokok dan SIM Pelaksanaan Tugas Bantuan. SIM pelaksanaan tugas pokok terdiri dari SIM pertanahan (SIMTA), SIM kependudukan (SIMDUK) dan SIM aktivitas manusia (SIMTASIA). Sedangkan SIM pelaksanaan tugas bantuan terdiri dari SIM keuangan (SIMKU), SIM kepegawaian (SIMPEG), SIM barang (SIMBAR) dan SIM surat menyurat dan kearsipan. Dan tahun 2003, PemDa DKI Jakarta membuat Master Plan teknologi informasi sesuai dengan SK Gubernur nomor 2001 tahun 2003 mengenai pembentukan ITSC dan Pergub nomor 16 tahun 2008 tentang rencana induk teknologi informasi dan

komunikasi. Sampai saat ini, implementasi sistem informasi di PemDa DKI Jakarta sudah mencakup seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) PemDa DKI Jakarta dan juga termasuk di 5 Walikotamadya, sehingga sistem informasi di PemDa DKI Jakarta sudah terintegrasi sampai ke Pusat Provinsi PemDa DKI Jakarta. Tahun 2007, PemDa DKI Jakarta semakin giat melakukan implementasi *e-Government* dengan mulai dijalankannya sistem *e-Procurement* yang meliputi *e-announcement* dan *e-reguler* tender yang sudah dapat diakses dari situs resmi PemDa DKI Jakarta yaitu <http://www.jakarta.go.id>.

Berdasarkan pemaparan di atas, dilihat dari kematangan pembangunan *e-Government* di PemDa DKI Jakarta, sesuai dengan teori *e-Government maturity model* Layne & Lee sudah memasuki tahap *transaction*. Dengan semakin berpengaruhnya implementasi *e-Government* terhadap pelayanan PemDa DKI Jakarta terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat *research question* yaitu **sejauhmana pengaruh e-Government terhadap kemampuan pemerintah dalam melakukan *knowledge sharing* dengan studi kasus di PemDa DKI Jakarta.**

1.2. Perumusan Masalah

Knowledge sharing merupakan kegiatan berbagi pengetahuan yang melibatkan interaksi sosial baik antar pegawai maupun pegawai dengan organisasi itu sendiri. *e-Government* merupakan dimensi teknologi yang bertindak sebagai fasilitator untuk mendukung kegiatan *knowledge sharing*. Dalam hal ini terdapat permasalahan yang dapat mengganggu efektifitas pelayanan masyarakat di antaranya permasalahan sumber daya manusia yang berkurang dikarenakan berakhirnya masa bakti (pensiun). Selain itu, belum siapnya aparat atau pegawai dalam penggunaan teknologi informasi (*resistance to changes*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, *knowledge sharing* merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi permasalahan di atas. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti kemampuan *knowledge sharing* PemDa DKI Jakarta dan sejauhmana pengaruh kedewasaan implementasi *e-Government* terhadap kemampuan *knowledge sharing* dan faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadi *knowledge sharing* di lingkungan PemDa DKI Jakarta.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian di pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai sampel penelitian. Peneliti

menyebarkan kuesioner terhadap dinas-dinas yang sudah melakukan implementasi *e-Government* yaitu BAPPEDA, BKD, DISKOMINFO, Badan Tata pemerintahan, dan BKPD.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemampuan pemerintah atau organisasi publik dalam melakukan *knowledge sharing* dan pengaruh tingkat kedewasaan implementasi *e-Government* terhadap kemampuan *knowledge sharing*.

Selain tujuan utama tersebut, ada juga beberapa manfaat dari penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan *knowledge sharing* sehingga dapat memperbaiki pelayanan terhadap publik.

2. KERANGKA PIKIR

2.1. e-Government

e-Government memiliki banyak definisi, adapun definisi-definisi mengenai *e-Government* adalah sebagai berikut :

- a. *e-Government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet oleh organisasi publik (pemerintah) untuk mendukung atau mendefinisikan kembali hubungan yang ada pada saat ini dan atau yang akan datang dengan *stakeholder* dalam lingkungan internal atau eksternal untuk menciptakan suatu nilai (Bekkers, 2003)[VIC06].
- b. *e-Government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan (<http://web.worldbank.org>).
- c. *e-Government* merupakan Pemerintah yang mendukung setiap pelayanan umum didasarkan pada infrastruktur komunikasi informasi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, bagaimanapun, dan sebagainya"[ALH07].

d. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”[INP03].

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 3 kata kunci dalam definisi *e-Government* tersebut yakni:

1. Penggunaan Teknologi Informasi (TI)
2. Pemberian layanan terhadap warga negara atau masyarakat
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Penggunaan TI merupakan alat bagi pemerintah untuk memberikan layanan terhadap warga negara atau masyarakat dan juga sebagai alat yang berfungsi sebagai jembatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan dan pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi ukuran sejauhmana pemerintah tersebut menjalankan *e-Government*.

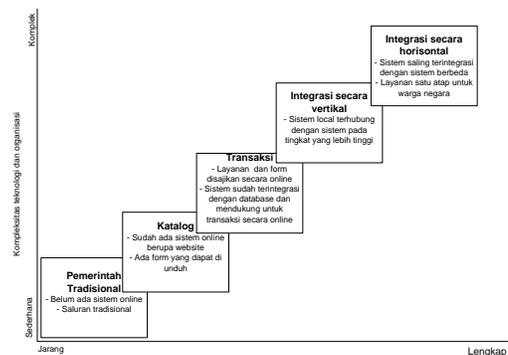
2.2. Tahapan Pembangunan *e-Government*

Pengukuran tingkat kematangan pengembangan *e-Government* dibutuhkan untuk menilai seberapa baik pengembangan *e-Government* itu dilakukan. Model penahapan *e-Government* dikembangkan baik oleh institusi maupun oleh individu di antaranya adalah :

- a. Penelitian oleh institute (United Nations and American Society For Public Administration pada tahun 2001 ; Baum and Di Maio pada tahun 2000; Gartner Group Deloitte and Touce pada tahun 2001; World Bank)
- b. Peneliti secara individual (Hiller dan Belanger pada tahun 2001; Layne dan Lee pada tahun 2001; Moon pada tahun 2002)

Layne dan Lee Model

Model yang dikembangkan oleh Layne dan Lee memiliki cukup banyak perbedaan jika pada model UN dan Gartner lebih fokus pada aspek teknis, Layne dan Lee model sudah mengakomodasi lebih banyak aspek seperti teknikal, organisasi, dan manajerial berdasarkan fenomena pengembangan *e-Government* yang muncul saat ini. Layne dan Lee (2001) mengajukan 4 tingkatan pertumbuhan berdasarkan model kematangan (kedewasaan) yakni: *catalogue*, *transaction*, *vertical integration*, dan *horizontal integration*.



Gambar 1. Model tahapan pembangunan layanan *e-Government* Layne & Lee

2.3. Dampak *e-Government*

Penelitian-penelitian sebelumnya, menemukan bahwa implementasi *e-Government* mempunyai manfaat dan dampak yang cukup signifikan dalam banyak hal. Manfaat tersebut antara lain adalah peningkatan efisiensi, kualitas layanan publik, transparansi, partisipasi publik, dan pengembangan ekonomi. Namun demikian, supaya efektif dalam implementasi *e-Government*, implementasi *e-Government* harus mempertimbangkan aspek lokal. Kata kunci dalam implementasi *e-Government* bukan adopsi, tetapi adaptasi di mana konteks lokal dalam perencanaan dan implementasi. Literatur lain menerangkan *e-Government* merupakan alat dari perubahan sistem dalam pemerintahan. Fungsi utama *e-Government* adalah alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Di samping kekuatan daya jangkauannya, *e-Government* mempunyai beberapa manfaat :

- a. Memperbaiki efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur dalam proses pemerintahan.
- b. Meningkatkan *good governance* dengan kontrol, transparansi, dan akuntabilitas.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan masyarakat baru faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat.

2.4. Knowledge

Davenport dan Prusak mendefinisikan pengetahuan (knowledge) sebagai campuran dari kerangka pengalaman, nilai, informasi dan wawasan para ahli yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan memasukan informasi dan pengalaman baru [SOO04]. Literatur lain mendefinisikan bahwa kata knowledge sebagai sesuatu bahan yang abstrak yang tidak dapat dilihat, seperti informasi, data, atau kompetensi [IBR06]. Sementara itu, menurut Turban, McClean, Wetherbe (2002) mendefinisikan

bahwa knowledge berbeda dari data dan informasi dalam konteks teknologi informasi (lihat gambar 3). Di mana data merupakan kumpulan fakta, ukuran dan statistik. Informasi merupakan data yang dikelola atau diproses secara tepat waktu dan akurat (McFadden et al., 1999; Watson, 1998).



Gambar 2. Data, Informasi dan Knowledge.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa *knowledge* merupakan sebuah asset yang bersifat tidak dapat dilihat (intangible) akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Pada dasarnya *knowledge* di bagi kedalam dua bentuk/kategori (Polanyi, 1958) yakni :

- *Tacit knowledge*
- *Explicit knowledge*

2.5. Knowledge sharing

Knowledge sharing merupakan kegiatan pertukaran pengetahuan diantara orang, teman atau anggota dari keluarga, komunitas atau organisasi (<http://en.wikipedia.org>). Bartol dan Srivastava mengidentifikasi empat mekanisme *knowledge sharing individu* didalam organisasi [SOO05] : a) mengkontribusikan pengetahuan kepada database organisasi, b) berbagi pengetahuan dalam interaksi *formal* dalam atau lintas tim atau unit kerja, c) berbagi pengetahuan dalam interaksi *informal*, dan d) berbagi pengetahuan dalam komunikasi praktis. Jika dihubungkan dalam *knowledge sharing* antar departemen atau unit, *knowledge sharing* didefinisikan sebagai “sebuah proses di mana satu unit dipengaruhi oleh pengalaman unit lainnya” (Argote et al. 2000, 3) [WIL06]. Pandangan terhadap *knowledge sharing* lebih dari mendapatkan atau mentransmisikan pengetahuan dari satu bagian ke bagian lainnya tetapi sebuah proses pertukaran dan memproses pengetahuan kedalam sebuah cara di mana pengetahuan dari satu unit dapat di integrasikan dan menggunakan pengetahuan unit yang lainnya [WIL06].

Terdapat tiga faktor dalam *knowledge sharing* yaitu manusia, organisasi dan teknologi. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan bahwa *knowledge sharing* sebagai interaksi sosial antara manusia. Dan juga, organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap *knowledge sharing*. Selanjutnya, teknologi merupakan fasilitator yang penting dari *knowledge sharing* [ALH07].

Faktor-Faktor Organisasi dan Kemampuan Knowledge sharing

Dalam sebuah organisasi, pengetahuan seringkali tidak hanya dilekatkan dalam dokumen, tetapi juga pada rutinitas organisasi, proses, praktik dan norma-norma. Sebagai pengetahuan merupakan sumber daya dari layanan pemerintah, *knowledge sharing* yang efektif di sektor publik merupakan tantangan bagi manajemen publik untuk memberikan keunggulan dalam layanan publik. Khususnya, kemampuan *knowledge sharing* dianggap sebagai kunci keberhasilan *e-Gov* dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan konstituen di semua tingkat pemerintahan. Penciptaan kemampuan *knowledge sharing* dalam organisasi publik membutuhkan penyebaran individu pekerja yang berhubungan dengan pengalaman dan kolaborasi diantara subsistem antara individu dan organisasi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya dan pemangku kepentingan merupakan dasar untuk meningkatkan *knowledge sharing* di sektor publik [SOO04].

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Terdapat 3 faktor organisasi sebagai variabel independent yang mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing* dalam organisasi publik yakni kultur organisasi (Visi dan Tujuan, kepercayaan, dan jaringan sosial), structure organisasi (centralisasi, formalisasi, dan sistem penghargaan berdasarkan kinerja) dan teknologi informasi (penggunaan aplikasi IT dan fokus pengguna) [SOO04][SOO05].

Sosial Budaya Organisasi

Tiga komponen budaya organisasi konsisten mendapatkan perhatian terkait dengan knowledge management yang efektif meliputi visi dan tujuan organisasi yang jelas, kepercayaan dan jaringan sosial. Sebuah komponen penting dari budaya adalah visi organisasi, visi dapat menghasilkan maksud organisasi yang jelas yang dapat mencapai tujuan masa depan organisasi yang diinginkan. Visi dan tujuan organisasi yang jelas dapat menimbulkan rasa keterlibatan dan kontribusi antara pegawai [SOO05]. Seiring dengan jelas visi dan tujuan organisasi, Von Krogh (1998) menunjukkan bahwa kepercayaan dan keterbukaan dalam mempromosikan budaya organisasi karyawan aktif mengelola pengetahuan perilaku [SOO04].

Berdasarkan hasil penelitian bahwa visi dan tujuan organisasi yang jelas tidak terlalu signifikan mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing* pegawai dalam organisasi publik [SOO04], akan tetapi dalam sektor organisasi *private* (swasta) visi dan

tujuan organisasi yang jelas lebih tinggi pengaruhnya terhadap kemampuan *knowledge sharing* pegawai dari pada sektor organisasi publik[S0005]. Berbanding terbalik dengan sector organisasi *private* (swasta) bahwa kejujuran dan jaringan sosial lebih berpengaruh terhadap aktivitas *knowledge sharing* dalam organisasi publik[S0005].

Struktur Organisasi

Dalam studi dijelaskan bahwa terdapat 3 variabel dari dimensi struktur organisasi yang mempengaruhi kemampuan dalam *knowledge sharing* meliputi sentralisasi, formalisasi dan sistem penghargaan berdasarkan kinerja[S0004]. Dalam studi literatur ini hanya menjabarkan dampak dari struktur organisasi terhadap *knowledge sharing*, di mana dalam organisasi yang terpusat peran *top manager* sebagai pemegang kendali control akan mempengaruhi kegiatan *knowledge sharing* karyawan [S0005]. Selanjutnya dampak dari formalisasi dalam kegiatan organisasi yang diwujudkan dalam dokumen yang tertulis mengenai manual prosedur, gambaran pekerjaan, peraturan dan kebijakan organisasi juga mempengaruhi kegiatan *knowledge sharing* karyawan [S0005].

Variabel lain dari dimensi struktur organisasi yang penting adalah sistem penghargaan berdasarkan kinerja. Penerapan sistem penghargaan organisasi akan mendorong motivasi pegawai untuk menghasilkan pengetahuan baru, berbagi pengetahuan, dan menolong orang lain diluar divisi atau fungsinya. (Argote & Eppele 1990; O'Dell & Grayson1998)[S0005].

Teknologi Informasi

Dalam studi ini menekankan bahwa pentingnya aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi untuk mengintegrasikan pengetahuan dan informasi organisasi[S0005]. Alavi dan Leidner mencatat bahwa IT menambahkan proses transfer pengetahuan dengan meluaskan individu dalam mencapai garis komunikasi secara formal [S0005]. Variabel penting lainnya adalah focus pengguna (*end user*)[S0004][S0005], di mana pengguna merupakan salah satu faktor yang paling penting yang akan mempengaruhi manfaat dari sistem yang telah dibuat..

2.6. Pola Pikir Penelitian

Knowledge sharing memiliki pengertian berbagi informasi, wawasan, pengalaman dan hal-hal yang dipelajari. Hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *knowledge sharing capability* dapat menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh

Rajagopalan dengan menggunakan kerangka penelitian yang meneliti 3 aspek yakni *enabler*, proses dan hasil.

Knowledge sharing enabler merupakan suatu mekanisme yang mendorong untuk melakukan *knowledge sharing* yang dilakukan karyawan baik dalam satu tim maupun antar tim atau antar departemen. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan bahwa yang termasuk kedalam *knowledge sharing enabler* menurut adalah faktor individu, faktor organisasi, dan faktor teknologi (Lee and Choi, 2003; Connelly and Kelloway, 2003; Taylor and Wright, 2004).

Proses *knowledge sharing* merujuk pada bagaimana karyawan dalam suatu organisasi saling berbagi pengalaman, keahlian, know-how, dan informasi. Proses *knowledge sharing* dianalogikan dengan transmisi pengiriman pesan pada proses komunikasi yaitu dari pengirim kepada penerima, pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas mendonasikan pengetahuan (*donating knowledge*) dan mengumpulkan pengetahuan (*collecting knowledge*).

Sedangkan "hasil" *knowledge sharing* mengungkapkan pengaruh atau dampak dari tingkat *knowledge sharing* secara efektif yang dicapai oleh perusahaan dalam hal ini diwakili oleh institusi pemerintahan.

e-Government Mempengaruhi Faktor Organisasi, Individual (Sosial), dan Proses Knowledge sharing

Hipotesis 1 :

Kedewasaan pembangunan e-government memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap faktor individu.

Hipotesis 2 :

Kedewasaan pembangunan e-government memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor organisasi..

Faktor Individu sebagai Determinan Proses Knowledge sharing

Hipotesis 3 :

Kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan *knowledge sharing*.

Hipotesis 4 :

Meningkatnya level kepercayaan karyawan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan *knowledge sharing*.

Hipotesis 5 :

Interaksi karyawan baik secara formal dan informal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kemampuan *knowledge sharing*.

Hipotesis 6 :

Pengetahuan efikasi diri memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kerelaan karyawan untuk melakukan Kemampuan knowledge sharing

Faktor Organisasi sebagai Determinan dari Proses Knowledge sharing

Hipotesis 7 :

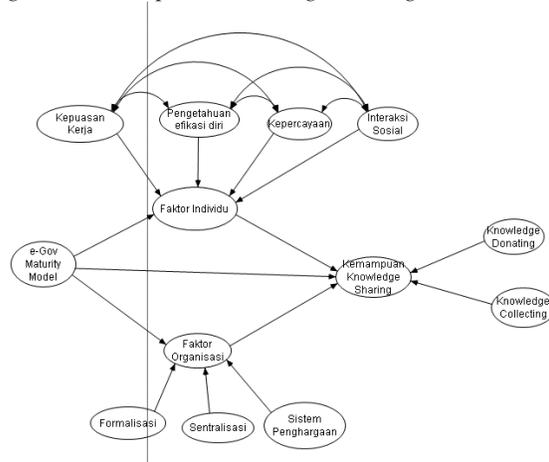
sentralisasi pada struktur organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan knowledge sharing.

Hipotesis 8 :

formalisasi pada struktur organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kegiatan proses knowledge sharing.

Hipotesis 9 :

Sistem penghargaan pada pemerintahan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kegiatan kemampuan knowledge sharing.



Gambar 3. Pola Pikir Penelitian

Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Jenis	Kategori	Dimensi	Definisi Operasional	Kode elemen	Sumber
Dependent Variable	Knowledge sharing Capability (KSC)	Knowledge Donating	Kemampuan karyawan untuk menyampaikan pengetahuan yang dimiliki, meliputi pengalaman kerja, gagasan, keahlian dan informasi kontekstual kepada karyawan lain.	Z11, Z12, Z13, Z14,	Hoff dan Ridder (2004)
		Knowledge Collecting	Kemampuan Karyawan untuk mengumpulkan pengetahuan dari karyawan, meliputi pengetahuan, pengalaman kerja, gagasan, keahlian, dan informasi kontekstual	Z21, Z22, Z23, Z24,	

Independent Variable	Faktor Individu	Kepuasan Kerja (X1)	Faktor individu yang menggambarkan pencapaian terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan	X11, X12, X14	Luthan, 1998
		Pengetahuan Efikasi Diri (X2)	Wawasan atau kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan	X21, X22, X23	Constant et al., 1994, Wasko & Faraj, 2005
		Kepercayaan (X3)	Faktor individu atau sosial terhadap organisasi yang menggambarkan tingkat kepercayaan baik terhadap antar pegawai, antar departemen dan organisasi	X31, X32, X33	Nonaka, 1991, Collins & Smith, 2006
		Interaksi sosial (X4)	Kemampuan individu untuk berinteraksi baik dalam organisasi maupun antar organisasi baik dalam mekanisme formal maupun informal	X41, X42, X43	Leonard & Sensiper, 1998, Levinthal & March, 1993, O'Dell & Grayson, 1998
		Norma Subjektif (X5)	Faktor individu atau sosial yang menggambarkan dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan	X51, X52, X13	Brink (2001)
Faktor Organisasi			Knowledge enabler Organisasi yang mempengaruhi knowledge sharing diantaranya adalah formalisasi, sentralisasi, dan sistem penghargaan	Y11, Y13, Y21, Y22, Y31, Y33	Leonard & Sensiper, 1998, Levinthal & March, 1993, O'Dell & Grayson, 1998
	Faktor Teknologi	e-Government Maturity Model	Model yang menggambarkan perkembangan pembangunan e-Government	G1	Layne dan Lee (2001)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas ilmiah yang sistematis adalah dengan *Personally Administrated Questionnaires* (Sekaran, 1992). Metode ini dilakukan dengan jalan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada para responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket tertutup yaitu angket yang digunakan untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari faktor individual, faktor organisasi dan faktor *e-Government maturity model*, pernyataan-pernyataan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala pengukuran yakni pertama

skala likert untuk mengukur faktor individu, faktor organisasi dan kemampuan knowledge sharing, kedua skala dikotomi untuk mengukur kedewasaan pembangunan e-Government (*e-Government maturity*).

Skala pengukuran likert pada penelitian menggunakan tipe data interval yang dimulai dari Sangat Setuju (SS) sampai Sangat Tidak Setuju (STS), Skala pengukuran dikotomi dalam penelitian ini menggunakan nilai dikotomi ya dan tidak. Dimana nilai dikotomi 'ya' bernilai 1 dan nilai dikotomi 'tidak' bernilai 0.

3.2. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan alat analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan program SPSS 15.0 dan AMOS 7.0. Hasil analisis akan berupa : statistik deskriptif, uji kasualitas data, uji signifikansi.

3.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara umum mengenai profil responden, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, jabatan, golongan, dan tabel distribusi frekuensi absolute dan relatif, yang menunjukkan angka rata-rata, dan deviasi standar.

3.3.2. Pengukuran e-Government Maturity

Dalam penelitian ini pengukuran *e-Government maturity* diukur berdasarkan persepsi pegawai terhadap kedewasaan pembangunan *e-Government* yang diterapkan PemDa DKI Jakarta. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat *awareness* pegawai terhadap perkembangan yang dilakukan oleh PemDa DKI Jakarta.

Dalam pembentukan kuesioner untuk mengukur *e-Government maturity*, peneliti merancang kuesioner berdasarkan *e-Government maturity* yang diusulkan oleh Layne & Lee. Adapun variabel konstruk atau variabel yang dapat diukur dibangun berdasarkan ciri-ciri *e-Government maturity model* yang tergolong dalam *catalogue*, *transaction* yang dapat dikenali melalui ciri-ciri pengembangan *e-Government*. Sementara ini berdasarkan referensi yang ada *vertical integration* dan *horizontal integration* belum dapat diukur dan masih bersifat hipotetical.

Untuk mengukur variabel konstruk pada kuesioner, peneliti menggunakan skala dikotomi 'ya' dan 'tidak'. Dan selanjutnya data-data kuesioner mengenai *e-Government maturity* akan dilakukan

konversi kedalam tahapan pembangunan *e-Government* dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Nilai 0 untuk tahapan Pemerintahan tradisional yang tidak termasuk kedalam tahapan *catalogue* dan *transaction*.
2. Nilai 1 untuk tahapan *catalogue*.
3. Nilai 2 untuk tahapan *transaction*.

3.3.3. Uji Validitas dan Realibilitas

Sebelum penelitian dilakukan, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.

3.3.4. Uji Validitas

Uji validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kehandalan angket. Kehandalan angket mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas item dilakukan dengan menggunakan program statistic SPSS 15.0 dengan melihat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor total pada harga *Corrected Item-Total Correlation*. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket ini dikatakan valid lebih besar dari 0.239 (Singgih, 2000). Terdapat tiga jenis validitas yang dapat diterima secara umum yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas yang berkaitan dengan kriteria. Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah uji validitas konstruk yang mengkorelasikan skor masing-masing item pertanyaan dengan total skornya.

Tabel 2. Kriteria Interpretasi terhadap Indeks Reliabilitas

Koefisien <i>alpha</i> (α)	Interprestasi
0,800-1,000	Sangat Tinggi (very high)
0,600-0,799	Tinggi (high)
0,400-0,599	Cukup Tinggi (moderate)
0,200-0,399	Rendah (low)
< 0,200	Sangat Rendah (very low)

3.3.5. Uji Normalitas Data

Evaluasi atas normalisasi data dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data sudah terdistribusi secara normal atau belum. Dalam evaluasi data penelitian ini dilakukan pengujian normalisasi data dengan mengamati skewness value dari data yang digunakan menggunakan program SPSS, pada tingkat signifikansi 0.01 (1%) dengan nilai kritis tabel sebesar 2,58 atau tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan kritis tabel 1.96. Sedangkan nilai statistic untuk menguji normalitas itu disebut sebagai z-value yang dihasilkan melalui rumus berikut:

$$z\text{-valu } e = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

Di mana N adalah ukuran sampel

Bila nilai z lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diduga bahwa distribusi data adalah tidak normal.

3.3.6. Uji Kesuaian Model

Tujuan utama dari analisis SEM adalah menguji fit suatu model yaitu kesesuaian model teoritik dengan data empiris.

Tabel 3. Kriteria Goodness of Fit

Kriteria Indek Ukuran	Nilai Acuan
Kai kuadrat (X^2)	Sekecil mungkin
CMIN/df	≤ 2.00
RMSEA	≤ 0.08
GFI	Mendekati 1
AGFI	Mendekati 1
RMR	≤ 0.05

4. ANALISA DATA DAN UJI HIPOTESIS

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Data Deskriptif

Pegawai di Pemerintah Daerah (PemDa) DKI Jakarta secara keseluruhan berjumlah 83.401 Pegawai, di mana 6.813 pegawai merupakan pegawai pada posisi struktural dan 25.311 pegawai dalam posisi staf serta 41.277 pegawai fungsional terdiri dari : 9 Badan, 21 Dinas, 1 Inspektorat, 10 Biro dan perangkat daerah lainnya, lebih lengkap dapat dilihat di <http://www.jakarta.go.id>.

Tabel 4. Hasil Pengumpulan Kuesioner

Kuesioner disebarkan	Kuesioner tidak kembali	Kuesioner kembali tidak layak analisis	Kuesioner kembali layak analisis
250	116	7	127
100%	46.4%	2.8%	50.8%

Dari tabel 4 diketahui bahwa yang tidak kembali mencapai 46.4 % dari total kuesioner yang disebarkan. Sedangkan kuesioner yang kembali namun tidak layak analisis mencapai 2.8 % dikarenakan sebagian besar hanya profil mengenai responden sementara kuesionernya tidak diisi atau dikosongkan. Sedangkan kuesioner yang layak analisis sejumlah 50.8 % sudah memenuhi syarat suatu pengolahan data penelitian.

Tabel 5. Responden berdasarkan umur

Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
18-25	2	1.6 %
26-35	28	22 %
36-45	47	37 %
46-55	46	36.2 %
>55	4	3.2 %

Tabel 6. Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	74	58.3 %
Perempuan	53	41.7 %

Tabel 7. Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
SD, SMP	0	0 %
SMU	31	24.4 %
Diploma	3	2.4 %
S1	58	45.7 %
S2	34	26.8 %
S3	0	0 %

Tabel 8. Responden berdasarkan Golongan PNS

Golongan PNS	Jumlah	Prosentase
IA, IB, IC, ID	0	0 %
IIA	3	2.4 %
IIB	4	3.1 %
IIC	1	0.8 %
IID	7	5.5 %
IIIA	20	15.7 %
IIIB	38	29.9 %
IIIC	16	12.6 %
IIID	30	23.6 %
IVA	4	3.1 %
IVB	2	1.6 %
IVC, IVD, IVE	0	0 %

Tabel 9. Responden berdasarkan Jabatan kerja

Jabatan Kerja	Jumlah	Prosentase
Struktural	25	19.7 %
Fungsional	9	7.1 %
Pelaksana (Staf)	93	73.2 %

Tabel 10. Responden berdasarkan masa kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1-10	22	17.3 %
11-20	51	40.2 %
21-30	49	38.6 %
31-40	5	3.9 %
41-50	0	0 %

Uji Normalisasi Data

Data dengan sampel sebesar 127 responden dilakukan uji normalitas terdahulu. Data dikatakan normal apabila $c.r$ *multivariate* (*critical ratio*) memiliki syarat $-2.58 < c.r < 2.58$. Hasil uji normalitas menunjukkan data tidak normal karena memiliki $c.r$ *multivariate* sebesar $42.156 > 2.58$ sehingga perlu dilakukan pembersihan data outlier yaitu signifikansi p_1 dan $p_2 < 0.05$. Hasil pembersihan data dari outlier, diperoleh $c.r$ *multivariate* sebesar $2.358 < 2.58$ yang berarti data normal. Dari 127 data terdapat outlier sebanyak 54 data sehingga data akhir yang digunakan dalam penelitian sebesar 73 data.

Uji Reliabilitas Data

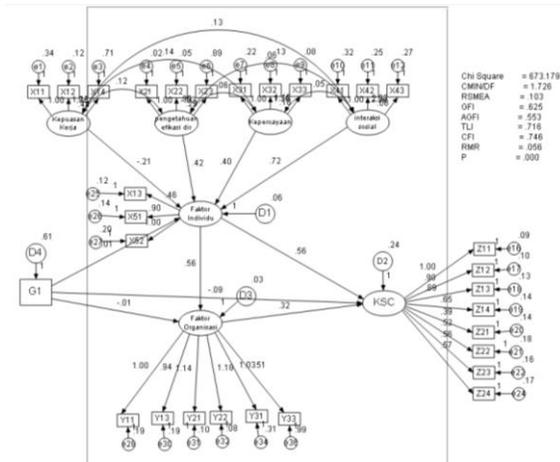
Data yang terkumpul kemudian dilakukan uji reliabilitas menggunakan metode *cronbach Alpha* dibantu dengan SPSS versi 15.0. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil uji reliabilitas data

Item	Jml	Variabel	Alpha	Keterangan
X11,X12,X14	3	Kepuasan kerja	0.744	Reliabel
X21,X22,X32	2	Pengetahuan efikasi diri	0.858	Reliabel
X31,X32,X33	3	Kepercayaan	0.807	Reliabel
X41,X43,X43	3	Interaksi social	0.689	Reliabel
X51, X52, X13	3	Norma Subjektif (Faktor Individu)	0.766	Reliabel
Y11,Y13,Y21, Y22, Y31, Y33	6	Faktor Organisasi	0.711	Reliabel
Z11-Z14	4	Knowledge Donating	0.925	Reliabel
Z21-Z24	4	Knowledge Collecting	0.852	Reliabel

Uji Kesesuaian Model

Hasil uji kesesuaian model dalam penelitian ini secara lengkap sebagai berikut :



Gambar 4. Model Lengkap Pengaruh *E-Government* terhadap Kemampuan *Knowledge sharing*

Pada gambar 6 di atas merupakan model yang menggambarkan pengaruh *maturity modele-Government* terhadap kemampuan *knowledge sharing* di mana e-Gov merupakan variabel unobserved yang mewakili dimensi teknologi yang dilihat dari *maturity model e-Government*, Faktor individu merupakan variabel unobserved yang mewakili dimensi faktor individu, adapun faktor individu mempunyai variabel *unobserved* lainnya yakni variabel X1 menunjukkan faktor kepuasan kerja, variabel X2 menunjukkan faktorpengetahuan efikasi diri, variabel X3 menunjukkan faktor kepercayaan dan variabel X4 menunjukkan faktor interaksi sosial. Variabel *unobserved* faktororganisasi merupakan variabel yang

mewakili dimensi organisasi yang terdiri dari faktor formalisasi, sentralisasi, dan sistem penghargaan. Untuk dimensi *knowledge sharing capablity* sendiri diwakili oleh variabel KSC.

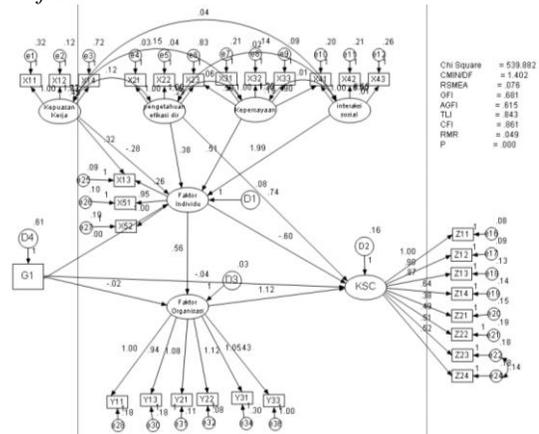
Hasil uji kesesuaian model menggunakan chi-square, CMIN/DF, GFI, AGFI, RMSEA, dan RMR diringkas sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil *Goodness of Fit* Model pengukuran

Indeks	Cut off value	Hasil	Evaluasi Model
Chi Square	Mendekati 0	673.179	Kurang Baik
CMIN/DF	<= 2.00	1.726	Baik
GFI	>= 0.90	0.625	Kurang Baik
RMSEA	<= 0.08	0.103	Kurang Baik
AGFI	>= 0.80	0.553	Kurang Baik
RMR	<= 0.05	0,056	Kurang Baik

Berdasarkan nilai *Chi-Squares* sebesar 673.179 signifikan pada $\alpha = 1\%$ sehingga berdasarkan uji statistika ini model kurang layak. Kemudian dikarenakan *Chi Squares* ini sangat sensitive terhadap besarnya sampel. Oleh karena itu, dilakukan uji statistika yang lain yaitu : RMSEA, GFI, AGFI, dan RMR. Keempat uji statistika dapat dilihat pada tabel 16.

Berdasarkan hasil uji RMSEA, GFI, AGFI, dan RMR model tidak layak, dikarenakan model tidak layak maka dilakukan respesifikasi model sesuai dengan *modification indices*. Berikut ini adalah model akhir dari respesifikasi model yang dilakukan berdasarkan *modification indices*.



Gambar 5. Modifikasi model lengkap pengaruh *e-Government* terhadap kemampuan *knowledge sharing*

Hasil uji kesesuaian model menggunakan *Chi Squares*, GFI, AGFI, RMSEA, dan RMR diringkas sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil *Goodness of Fit* model akhir

Indeks	Cut off value	Hasil	Evaluasi Model
Chi Square	Mendekati 0	539.882	Kurang Baik
CMIN/DF	<= 2.00	1.402	Baik
GFI	>= 0.90	0.681	Kurang Baik
RMSEA	<= 0.08	0.076	Kurang Baik
AGFI	>= 0.80	0.615	Kurang Baik
RMR	<= 0.05	0,049	Kurang Baik

Chi Square	Mendekati 0	539.882	Marginal
CMIN/DF	<= 2.00	1.402	Baik
GFI	>= 0.90	0.751	Kurang baik
RMSEA	<= 0.08	0.076	Baik
AGFI	>= 0.90	0.615	Kurang baik
RMR	<= 0.05	0.049	Baik

Setelah ditetapkan model akhir maka dilakukan uji statistika terhadap model akhir tersebut dengan hasil seperti pada tabel 17. Berdasarkan uji statistika Chi Squares, GFI, dan AGFI dinyatakan bahwa model tidak layak, akan tetapi menurut uji statistika RMSEA dan RMR model layak. Sesuai dengan referensi bahwa sebagai *rule of thumb*, bila salah satu kriteria (*Chi Squares*, RMSEA, GFI, AGFI, dan RMR) sudah terpenuhi maka model dianggap layak [WID10]. Pada model akhir, dikarenakan sudah memenuhi 2 kriteria dari 5 kriteria yang ada maka dinyatakan bahwa model akhir dianggap layak.

Uji Kesahihan Konvergen

Uji kesahihan konvergen diperoleh dari data pengukuran model setiap variabel (*measurement model*), uji ini dilakukan untuk menentukan kesahihan setiap indicator yang diestimasi, dengan mengukur dimensi dari konsep yang diuji pada penelitian. Apabila setiap indikator memiliki nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standar error*), menunjukkan bahwa indikator secara shahih telah mengukur apa yang seharusnya diukur pada model yang disajikan (Ferdinand, 2002). Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standart ratio*) yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian. Nilai bobot regresi pada masing-masing konstruk sebagai berikut :

Tabel 14. Bobot Regresi pada Faktor

		Esti mate	S. E.	C. R.	P	La bel
Faktor_In dividu	<-- Kepuasan_Kerja	-.278	.126	2.213	.027	par_18
X11	<-- Kepuasan_Kerja	1.000				
X12	<-- Kepuasan_Kerja	1.027	.161	6.379	**	par_1
X14	<-- Kepuasan_Kerja	.734	.182	4.025	**	par_2
Faktor_In dividu	<-- pengetahuan_efikasi dir	.376	.112	3.352	**	par_19
X21	<-- pengetahuan_efikasi dir	1.000				
X22	<-- pengetahuan_efikasi dir	.999	.084	11.870	**	par_3
X23	<-- pengetahuan_efikasi dir	-.162	.221	-7.324	.46	par_4

		Esti mate	S. E.	C. R.	P	La bel
Faktor_In dividu	<-- Kepercayaan	.511	.163	3.140	.002	par_20
X31	<-- Kepercayaan	1.000				
X32	<-- Kepercayaan	1.395	.224	6.238	**	par_5
X33	<-- Kepercayaan	1.301	.205	6.353	**	par_6
Faktor_In dividu	<-- interaksi_sosial	1.985	1.552	1.279	.201	par_21
X41	<-- interaksi_sosial	1.000				
X42	<-- interaksi_sosial	8.646	6.247	1.384	.166	par_7
X43	<-- interaksi_sosial	6.795	4.958	1.370	.171	par_8
X52	<-- Faktor_Individu	1.000				
X51	<-- Faktor_Individu	.953	.155	6.164	**	par_16
X13	<-- Faktor_Individu	.261	.099	2.642	.008	par_17
Y11	<-- Faktor_Organisasi	1.000				
Y13	<-- Faktor_Organisasi	.939	.245	3.828	**	par_25
Y21	<-- Faktor_Organisasi	1.076	.297	3.625	**	par_26
Y22	<-- Faktor_Organisasi	1.122	.291	3.860	**	par_27
Y31	<-- Faktor_Organisasi	1.046	.294	3.554	**	par_28
Y33	<-- Faktor_Organisasi	.433	.427	1.014	.319	par_29
Z11	<-- KSC	1.000				
Z12	<-- KSC	.901	.081	11.077	**	par_9
Z13	<-- KSC	.875	.092	9.500	**	par_10
Z21	<-- KSC	.383	.082	4.653	**	par_11
Z22	<-- KSC	.488	.095	5.110	**	par_12
Z23	<-- KSC	.513	.094	5.470	**	par_13
Z24	<-- KSC	.517	.094	5.508	**	par_14
Z14	<-- KSC	.641	.087	7.346	**	par_15

4.6. Uji Kasualitas Model

Melalui program statistik AMOS dapat dianalisis dan dihitung hasil bobot regresi antar variabel laten yang sering disebut sebagai estimasi loading factor atau *lambda value*. Selain itu derajat bebas atau *degree of freedom* (df), nilai C.R atau t-hitung juga dapat diketahui berdasarkan signifikansi t-hitung dengan

nilai probabilitas (p) = 0.05. Hasil bobot regresi uji kausalitas sebagai berikut :

Tabel 15. Hasil Bobot Regresi

			Esti	S.	C.	P	La
			mate	E.	R.		bel
Faktor_Individu	<-- G1		.000	.065	.005	.99	par_3 6 0
Faktor_Organisasi	<-- Faktor_Individu		.562	.170	3.30	**	par_2 * 4
Faktor_Organisasi	<-- G1		-.018	.044	-.411	.68	par_3 1 1
KSC	<-- Faktor_Individu		-.603	.475	1.26	.20	par_2 4 2
KSC	<-- Faktor_Organisasi		1.125	.623	1.80	.07	par_2 6 1 3
KSC	<-- G1		-.045	.081	-.556	.57	par_3 8 8
KSC	<-- pengetahuan_efikasi_dir		.737	.157	4.69	**	par_4 * 3

Efek Langsung, Tidak Langsung dan Efek Total Variabel

Besarnya pengaruh masing-masing variabel laten secara langsung (*standardized direct effect*) maupun tidak langsung (*standardized indirect effect*) serta efek total (*standardized total effect*) diringkas dalam tabel di bawah ini :

Tabel 16. Efek Lagsung, Efek Tidak Langsung dan Efek Total

Variabel	Efek langsung	Efek tidak langsung	Efek total
G1 → Faktor Individu	0.001	0.000	0.001
G1 → Faktor Organisasi	-0.044	0.000	-0.044
G1 → KSC	-0.058	-0.026	-0.084
Faktor Individu → KSC	-0.463	0.485	0.022
Faktor Organisasi → KSC	0.588	0.000	0.588

Uji Hipotesis

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing* (KSC) sesuai dengan teori dipengaruhi oleh faktor individu (manusia), organisasi dan teknologi. berdasarkan data-data di atas maka :

Tabel 21. Kesimpulan hasil pengujian hipotesis penelitian

Hipo Tesis	Bunyi Hipotesis	Hasil Pengujian
H1	Kedewasaan pembangunan e-Government memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor individu.	Ditolak
H2	Kedewasaan pembangunan e-	Ditolak

	Government memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor organisasi	
H3	Kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan <i>knowledge sharing</i>	Ditolak
H4	Meningkatnya level kepercayaan karyawan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan <i>knowledge sharing</i>	Ditolak
H5	Interaksi karyawan baik secara formal dan informal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kemampuan <i>knowledge sharing</i>	Ditolak
H6	Pengetahuan efikasi diri memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kerelaan karyawan untuk melakukan Kemampuan <i>knowledge sharing</i>	Diterima
H7	sentralisasi pada struktur organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan <i>knowledge sharing</i> .	Diterima
H8	formalisasi pada struktur organisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kegiatan proses <i>knowledge sharing</i> .	Diterima
H9	Sistem penghargaan pada pemerintahan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kegiatan kemampuan <i>knowledge sharing</i> .	Diterima

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan bahwa pembangunan e-Government khusus di PemDa DKI Jakarta belum secara signifikan mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing* pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat faktor yang memiliki potensi untuk mendorong proses berbagi pengetahuan antar pegawai dan akan berpengaruh positif terhadap kemampuan *knowledge sharing* yaitu faktor pengetahuan efikasi diri. Terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian bagi PemDa DKI Jakarta agar dapat mendorong terjadi proses berbagi pengetahuan yang pada saat ini tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan *knowledge sharing* Pemerintah yaitu :

1. Faktor kepercayaan, dimana perlu dipupuknya kembali tingkat kepercayaan yang meliputi *ability, benevolence, dan integrity*.
2. Faktor kepuasan kerja, perlunya menciptakan kepuasan kerja di lingkungan pekerjaan
3. Faktor interaksi sosial, perlunya mendorong terjadinya interaksi sosial antar pegawai lebih baik lagi melalui berbagai kegiatan yang mendorong terjadinya interaksi sosial dalam pekerjaan.

4. Faktor sistem penghargaan, perlu adanya sistem penghargaan yang mendorong terjadinya kegiatan knowledge sharing.

Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PemDa DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan lebih baik lagi faktor sudah memiliki pengaruh terhadap kemampuan knowledge sharing dan mendorong faktor-faktor yang masih belum secara signifikan mempengaruhi kemampuan knowledge sharing.

5.PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa dari 9 (delapan) hipotesis yang telah didefinisikan sebelumnya, hanya 4 (tiga) hipotesis yang diterima yang menyatakan pengetahuan efikasi diri mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pegawai yang percaya bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap *performance* organisasi melalui pengetahuan mereka akan berpengaruh positif terhadap kesediaan untuk berbagai pengetahuan. Informasi lain yang diperoleh adalah bahwa formalisasi dan sentralisasi ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *knowledge sharing*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa Pengaruh e-Government terhadap kemampuan *knowledge sharing* di PemDa DKI Jakarta belum terlalu signifikan mempengaruhi kemampuan *knowledge sharing* di lingkungan tersebut.

REFERENCES

- [ALH07] Al Hakim, Latif, "Global *e-Government* : Theory, Applications, and Benchmarking", Idea Group Publishing Hershey-London-Melbourne-Singapore, 2007.
- [BAM08] Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, "Metode penelitian kuantitatif", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- [BUR09] Burhan Bungin, "Metodologi penelitian kuantitatif", Prenada media group, Jakarta, 2009.
- [IBR06] Ibrahim Othman, Jasmine Nurfarahin, See Abdullah, "The Critical Issue of *Knowledge sharing* in *e-Government* Initiative", Proceedings of the postgraduate Annual Research Seminar 2006.
- [HSI07] Hsiu-Fen Lin, "*Knowledge sharing* and firm innovation capability : an empirical study", International journal of manpower vol.28. No.3/4, 2007.
- [INP03] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
- [IVA02] Ivancevich, Matteson, "Organizational Behavior and Management Sixth Edition", McGraw-Hill, 2002.
- [JOG08] Jogiyanto, "Metodologi penelitian sistem informasi", ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- [LUC08] Luciana Andrawina, Rajesri Govindaraju, TMA Ari Samadhi, Iman Sudirman, "Hubungan antara *knowledge sharing* capability, Absortive capacity, dan mekanisme formal : studi kasus industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia", Jurnal teknik industri vol. 10 no.2, 158-170, 2008.
- [MAN09] Manerep Pasaribu, "*Knowledge sharing* meningkatkan kinerja layanan perusahaan : studi kasus best practices sharing di PLN", Elex media komputindo, Jakarta, 2009.
- [PAU07] Paul L Tobing, "Knowledge management : konsep, arsitektur dan implementasi", Graha ilmu, Yogyakarta, 2007.
- [PAU01] Paul Van Den Brink, "Measurement of conditions for *knowledge sharing*", Proceedings 2nd European Conference on Knowledge Management, 2001.
- [SAN07] Sangkala, "Knowledge management", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [SOO04] Soonhee Kim, Hyangsoo Lee, "Organizational Factors Affecting *Knowledge sharing* Capabilities in *e-Government* : An Empirical Study", dg.2004.
- [SOO05] Soonhee Kim, Hyangsoo Lee, "Employee *Knowledge sharing* Capabilities In Public & Private Organization : Does Organizational Context Matter?", Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences-2005.
- [TON09] Tony Wijaya, "Analisis structural equation modeling menggunakan AMOS", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- [TUR02] Turban, McLean, Wetherbe, "Information technology for management : transformation business in the digital economy 3rd Edition", Jhon Wiley & Sons, INC, The United State of America, 2002.
- [VIC06] Victor van der waal, Jeroens Vloeimans, "The Impact of e-government on the organization : a case study in Amsterdam", *Sprouts:Working Papers on Information Systems*, 6(20) – 2006.
- [WIL06] Willem Annick, Buelens Marc, "*Knowledge sharing* in Public Sector Organizations: The Effect of Organizational Characteristics on Interdepartmental *Knowledge sharing*", 2006.